

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

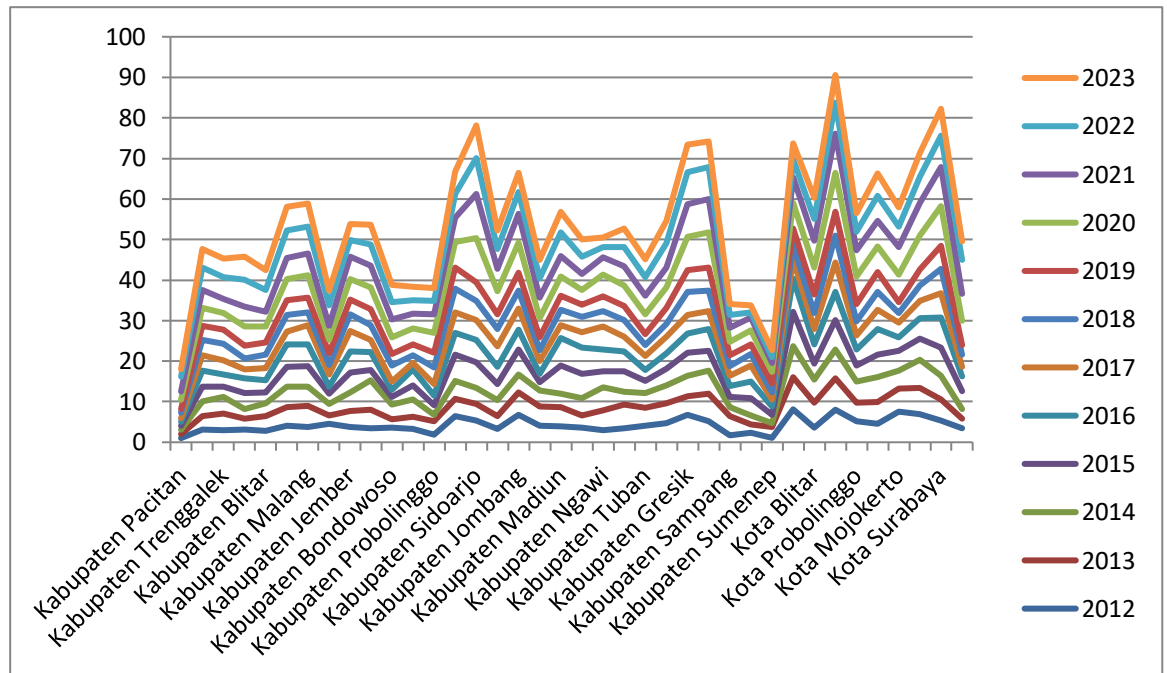
Indonesia merupakan negara berkembang yang menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan ekonomi, salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka. TPT merupakan indikator yang mengukur presentase jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan, dibandingkan dengan total angkatan kerja. Seluruh negara di dunia tanpa terkecuali, menghadapi permasalahan ini dengan tingkat yang berbeda-beda. Dalam konteks ekonomi, TPT menjadi persoalan serius karena dapat menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya memunculkan berbagai dampak sosial dan ekonomi (Kusnadi & Rahmah, 2022).

Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi tantangan penting yang dialami pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk dan angkatan kerja yang tidak diimbangi pada tersedianya lowongan pekerjaan menyebabkan peningkatan TPT. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dapat memicu berbagai dampak sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan ketidakstabilan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia, yang

berujung pada meningkatnya risiko kemiskinan (Kusnadi & Rahmah, 2022). Oleh karena itu, rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

Permasalahan TPT ini hampir merata di semua provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Di provinsi ini, Tingkat Pengangguran Terbuka membawa dampak signifikan terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2012 sampai 2023, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Timur terus terjadi fluktuasi. Bagaimanapun, provinsi ini tidak termasuk yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa.

Gambar di bawah ini menyajikan data tentang Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur selama periode 2012-2023 :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2023

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur
periode 2012-2023

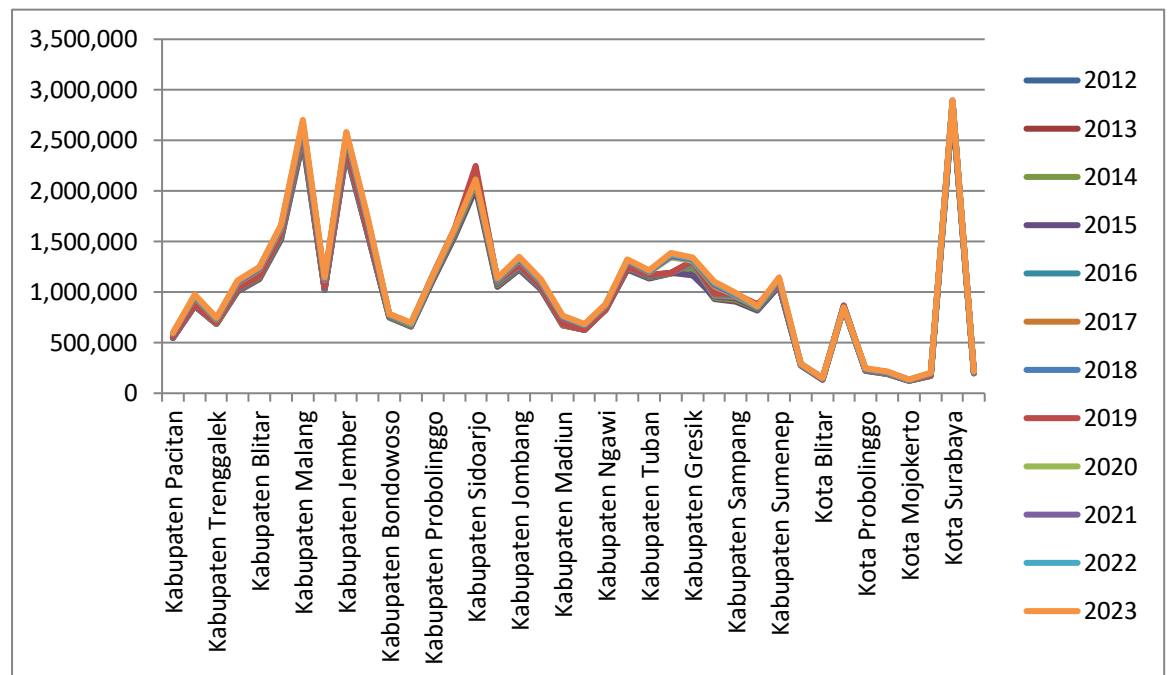
Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur selama periode 2012 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada awal tahun 2012, rata-rata tingkat pengangguran di berbagai kabupaten/kota berada di kisaran 3–5 persen. Beberapa daerah seperti Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Surabaya mencatat angka cukup tinggi di atas 7 persen. Fluktuasi semakin terasa ketika memasuki tahun 2020, di mana terjadi lonjakan signifikan akibat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan pengangguran dari 4,62% (2019) menjadi 10,97% (2020), sementara Kota Surabaya

meningkat drastis hingga 9,79% pada tahun yang sama. Ini mencerminkan dampak besar pandemi terhadap pasar tenaga kerja di wilayah perkotaan.

Meskipun terjadi pemulihan secara bertahap pasca pandemi, data tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi. Beberapa wilayah, seperti Kabupaten Lamongan dan Kota Batu, masih mencatat angka pengangguran di atas 5%. Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan perbaikan cukup signifikan, seperti Kabupaten Pamekasan yang turun menjadi 1,74% dan Kabupaten Sumenep menjadi 1,71%. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa TPT di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan global, serta efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan setelah krisis pandemi. Pemerataan kesempatan kerja di seluruh kabupaten/kota tetap menjadi tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif.

Tingkat pengangguran yang tinggi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang signifikan yang tidak diiringi dengan meningkatnya lapangan kerja. Setiap tahun, jumlah angkatan kerja terus meningkat, dan ketika lapangan pekerjaan tidak mampu menampung angkatan kerja tersebut, maka akan timbul meningkatnya TPT. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penciptaan lapangan kerja memperburuk situasi pengangguran (Ghozali & Aji, 2024). Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi oleh peningkatan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan selisih total tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, dapat

menyebabkan terjadinya bertambahnya tingkat pengangguran. Teori Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan hidup dapat terjadi jika pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada perkembangan sumber daya seperti pangan dan pekerjaan, akan menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Pada awalnya, pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ketika populasi melebihi tingkat optimal, peningkatan penduduk justru dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jika kualitas penduduk tidak memadai (Daulay & Haris, 2023).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2012-2023

Gambar 1.2 Jumlah penduduk di Jawa Timur periode 2012-2023

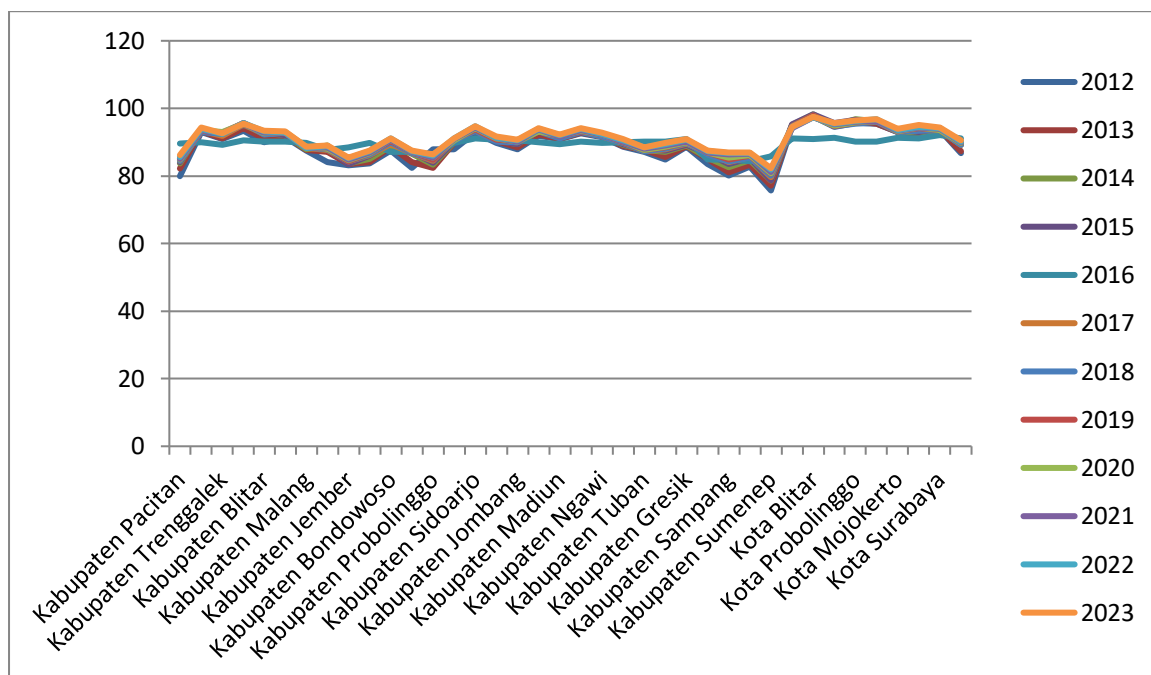
Selama periode 2012 hingga 2023, jumlah penduduk di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2012, jumlah penduduk di banyak daerah masih berada pada kisaran pertumbuhan rendah, namun mulai meningkat secara signifikan terutama pada tahun 2020. Kenaikan tertinggi tercatat di tahun 2020 yang diduga berkaitan dengan pemutakhiran data dari Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta faktor migrasi dan pertumbuhan alami.

Misalnya, Kabupaten Pacitan meningkat dari 545.905 jiwa (2012) menjadi 596.649 jiwa (2023), dan Kabupaten Malang dari 2.490.878 jiwa menjadi 2.703.175 jiwa pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan adanya penambahan populasi yang relatif merata di

berbagai wilayah, dengan rata-rata pertumbuhan berkisar antara 1% hingga 1,2% per tahun.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil ini dapat diartikan sebagai indikator dari dinamika demografis yang positif. Namun, di sisi lain, peningkatan populasi juga berpotensi menimbulkan tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti lapangan kerja, layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik yang memadai. Peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap lapangan kerja, yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran apabila tidak seimbang pada lapangan pekerjaan yang cukup. Sebagai contoh, selama periode 2012-2023, meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk, tingkat pengangguran di Jawa Timur mengalami fluktuasi.

Selain faktor demografi, Ketimpangan gender juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keadaan dimana laki-laki dan perempuan tidak setara dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan kerja disebut ketimpangan gender. Akibatnya ketidaksetaraan ini sering terlihat dalam perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor formal (Hutasoit & Rozaini, 2023).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2012-2023

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur periode 2012-2023

Berdasarkan data IPG di Provinsi Jawa Timur selama periode 2012 hingga 2023, terjadi kecenderungan peningkatan yang mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2012, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki nilai IPG yang masih berada di bawah angka 90 persen. Misalnya, Kabupaten Sumenep mencatat IPG sebesar 75,71%, Kabupaten Sampang sebesar 80,15%, dan Kabupaten Pacitan sebesar 79,84%. Angka-angka ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama di wilayah dengan karakteristik perdesaan atau kepulauan.

Namun, tren positif mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada

tahun 2016, beberapa daerah mengalami lonjakan signifikan, seperti Kabupaten Pacitan yang naik dari 84,19% pada 2015 menjadi 89,65% pada 2016. Meskipun demikian, beberapa daerah mengalami sedikit penurunan pada tahun tersebut, misalnya Kota Blitar dari 98,23% (2015) menjadi 90,93% (2016), yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan metode pengukuran atau dinamika sosial ekonomi lokal.

Memasuki tahun 2020 hingga 2023, sebagian besar daerah menunjukkan kestabilan atau peningkatan nilai IPG. Di tahun 2023, Kota Blitar masih menjadi wilayah dengan IPG tertinggi yaitu 97,49%, diikuti Kota Probolinggo sebesar 96,48% dan Kota Pasuruan sebesar 96,81%. Di sisi lain, Kabupaten Sumenep tetap menjadi daerah dengan IPG terendah meskipun mengalami peningkatan, yaitu mencapai 82,29% pada 2023. Kota Surabaya juga menunjukkan kinerja yang baik dengan IPG sebesar 94,36% pada 2023, yang menandakan adanya pembangunan yang relatif setara antara perempuan dan laki-laki.

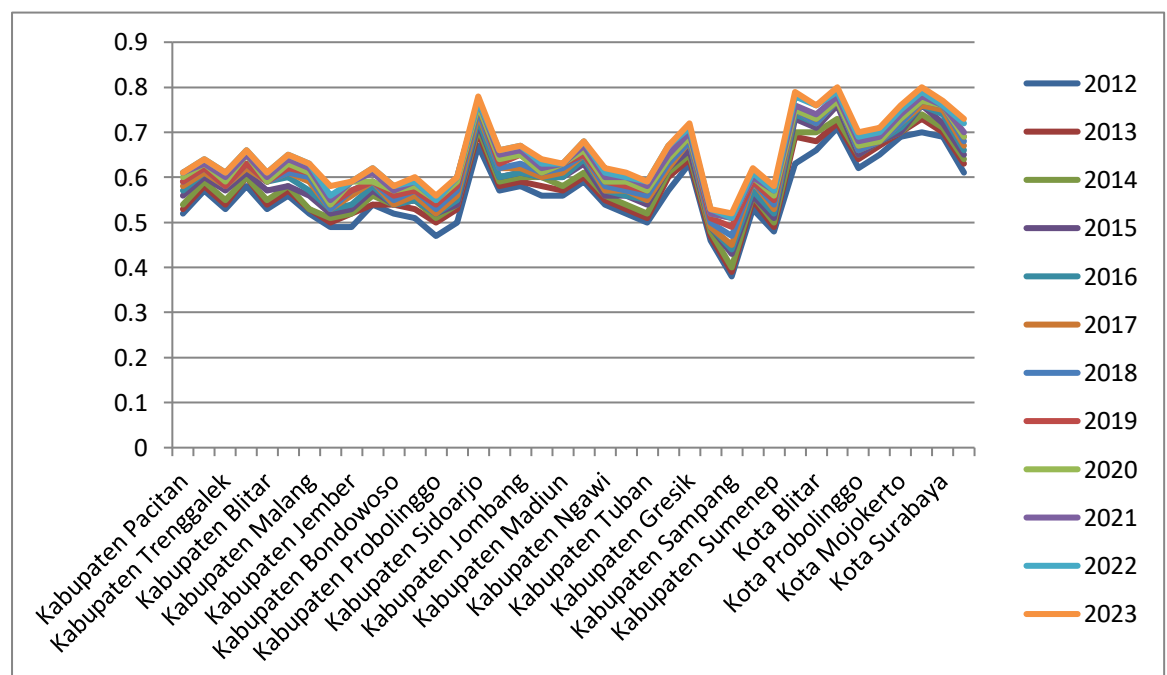
Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai IPG yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan atau kepulauan. Hal ini dapat dikaitkan dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan kerja di kota. Berdasarkan indikator yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik, IPG merepresentasikan perbandingan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Semakin mendekati nilai 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan berbasis gender (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perubahan indeks pembangunan gender adalah tingkat pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu seperti, kecerdasan, karakter, pengendalian diri, dan kualitas lainnya (Ramadhani & alauddin, 2023).

Faktor yang mampu berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka adalah pendidikan. Pendidikan adalah komponen utama guna kemajuan sosial dan ekonomi, berguna untuk membentuk kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan (Cahyani & Muljaningsih, 2022). Tingkat pengangguran dapat dikurangi karena seseorang yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi mempunyai lebih banyak peluang pekerjaan. karena dianggap memiliki kompetensi yang lebih baik, pasar kerja cenderung lebih mudah menyerap sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pada akhirnya dapat menurunkan TPT. Berdasarkan pengamatan (Hartanto & Masjkuri, 2017), meskipun pendidikan mempengaruhi tingkat pengangguran tidak signifikan negatif, kesimpulan pengamatan menghasilkan bahwa pengaruh pendidikan pada tingkat pengangguran memiliki efek yang sangat positif dalam mengurangi TPT.

Teori Human Capital menjelaskan bahwa pendidikan dianggap sebagai investasi modal bagi individu. Melalui pendidikan, seseorang akan meningkatkan pemahamannya dalam bidang tertentu, akibatnya mempunyai keahlian lebih kompeten dalam menyelesaikan permasalahan dan menghasilkan barang atau jasa. Jika dibandingkan

dengan lulusan sekolah menengah, pekerja yang lulus dari perguruan tinggi biasanya menerima gaji lebih baik. Seseorang yang berpendidikan tinggi memiliki lebih banyak peluang kerja dan cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah (Afifah & Hanifa, 2022). Lebih lanjut, pendidikan juga mendorong peningkatan produktivitas dan memperbesar kemungkinan seseorang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, seperti melalui kewirausahaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menurunkan TPT secara langsung, tetapi juga memperkuat daya saing tenaga kerja dalam pasar domestik dan global (Puspitasari & Nugroho, 2023). Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena akses terhadap pendidikan berkualitas mampu mengurangi angka pengangguran dan menaikkan persaingan seseorang di pasar kerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2012-2023

Gambar 1.4 Indeks Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2012-2023

Indeks pendidikan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten selama periode 2012 hingga 2023, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi tiap tahunnya. Pada awal tahun 2012, sebagian besar kabupaten/kota memiliki nilai indeks pendidikan yang masih berkisar antara 0,46 hingga 0,58. Namun, pada tahun 2023, nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan di hampir seluruh wilayah, dengan beberapa kota besar seperti Kota Malang dan Kota Madiun telah mencapai angka 0,80.

Kota Surabaya, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, mencatat peningkatan dari 0,69 pada 2012 menjadi 0,77 di tahun 2023, mencerminkan akses pendidikan yang semakin merata dan berkualitas. Wilayah lainnya seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto juga mengalami kenaikan yang stabil hingga mencapai angka di atas 0,75. Sementara itu, daerah-daerah dengan indeks rendah seperti Kabupaten Sampang dan Bangkalan tetap menunjukkan pertumbuhan, meskipun lambat, dari kisaran 0,38–0,49 di awal periode menjadi sekitar 0,52–0,53 di akhir periode.

Peningkatan indeks pendidikan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah, serta perbaikan fasilitas dan tenaga pendidik di berbagai wilayah. Namun, laju pertumbuhan yang cenderung melambat di beberapa daerah, khususnya selama masa pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020–2021, menandakan masih adanya tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan (BPS Jawa Timur, 2024).

Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dalam Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode 2012-2023. Faktor-faktor seperti pertumbuhan jumlah penduduk, IPG, dan tingkat pendidikan terus menunjukkan kenaikan tahunan, yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Meskipun begitu, tingkat pengangguran di Jawa Timur mengalami perubahan, utamanya saat tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak individu yang masih kesulitan mencari pekerjaan meskipun kesejahteraan meningkat. Selain itu, meskipun jumlah penduduk, indeks pembangunan gender dan tingkat pendidikan meningkat, tingkat pengangguran tetap tinggi. Ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, peneliti akan melakukan pengamatan bertema "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pendidikan terhadap Pengangguran di Jawa Timur Periode 2012-2023"

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023 ?
3. Apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023 ?
4. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk, IPG, dan pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023 ?

1.3 Tujuan masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang bisa kita ambil adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPG pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pendidikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, IPG, dan indeks pendidikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2012-2023.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya wawasan teoritis terkait hubungan antara jumlah penduduk, indeks pembangunan gender (IPG), indeks pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan perspektif ekonomi, teori Thomas Robert Malthus tentang pertumbuhan penduduk, teori Nature tentang indeks pembangunan gender serta teori Modal Manusia tentang pendidikan menjadi landasan utama. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan studi lebih lanjut yang fokus pada gabungan variabel jumlah penduduk, indeks pembangunan gender, indeks pendidikan dalam tingkat pengangguran terbuka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data. Melalui hasil penelitian, pemerintah dapat merancang kebijakan strategis guna menyeimbangkan pertumbuhan penduduk, mendorong kesetaraan gender, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait topik serupa.